

Pemutihan Denda Pajak Kendaraan

BATAM KOTA (BP) - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat bayar pajak kendaraan, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mengambil sejumlah kebijakan, salah satunya pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Batam Teddy Mar mengatakan rencananya pemutihan denda pajak kendaraan bermotor Kepulauan Riau akan diluncurkan 4 Mei 2018.

"Pemutihan (denda pajak kendaraan) ini di-launching Pak Gubernur, Jumat (4/5). Sebenarnya jadwalnya tanggal 1 Mei tapi kita buat acaranya Jumat. Lokasinya di Kantor KPPD Kota Batam," ujar Teddy, kemarin.

Menurut dia, kebijakan yang ditempuh ialah dengan melakukan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kedua (BBN-KB), serta adanya keringanan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor 50 persen.

Pemutihan Denda Pajak Kendaraan

Sambungan dari hal 9

"Kalau untuk biaya balik nama sudah jelas gratis dan tidak ada melakukan pembayaran lagi," terangnya.

Sementara itu, untuk pajak tertunggak diskon 50 persen. Lalu dendanya dihilangkan, atau tidak dihitung lagi. Terkait persyaratannya, bila tidak ada penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ataupun plat itu cukup membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tapi untuk penggantian nama dengan penggantian STNK, masyarakat cukup membawa BPKB asli, KTP, dan surat jual beli.

Teddy berharap masyarakat memanfaatkan program ini. "Seperti biaya balik nama su-

dah digratiskan. Jangan lagi ada yang tidak balik nama. Nanti misalnya kalau kota minta KTP pemilik tapi tak ada, malah dianggap dipersulit," tutur dia.

Anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua memberikan apresiasi kepada Pemprov Kepri yang melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Meski demikian, ia menyoroti lemahnya validasi data yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri. Pemutihan upaya bagus, tetapi harus didukung dengan data wajib pajak yang mangkir," ujarnya.

Politisi Partai Hanura tersebut menjelaskan Kepri merupakan daerah yang memiliki

banyak pulau. Artinya, ketika kendaraan bermotor keluar ke pulau-pulau, tingkat kesadaran wajib pajak akan hilang. Karena beranggapan untuk apa bayar pajak. "Selain itu, juga kendaraan-kendaraan yang sudah rusak dan tidak terpakai lagi," paparnya.

Terpisah, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengaku sudah mendapat laporan dari BP2RD Kepri. Menurutnya, peluncuran program tersebut akan dilaksanakan pada minggu pertama Mei 2018. Dirinya berharap, kebijakan ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kepri.

"Output yang kita harapkan bukan hanya soal PAD. Tetapi membangkit kesadaran masyarakat," ujar Nurdin. (rng)

Pedagang Segera Dipindahkan

Sebulan Lagi Pasar Induk Jodoh Diserahkan ke Pemko

ADIANSYAH, Batam Kota

WALI Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan pemindahan pedagang yang kini masih ada di dalam dan sekitar Pasar Induk Jodoh akan segera dilakukan.

Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemko) Batam saat ini ting-

gal menunggu penyerahan aset yang akan dilakukan sekitar 40 hari setelah cek fisik aset oleh Kementerian Keuangan, Jumat (20/4) lalu. "Maka setelah itu (ketetapan penyerahan aset) keluar, pedagang kita pindahkan dulu," kata Rudi.

Ia mengungkapkan desain

pasar induk yang akan dibangun kini sudah diselesaikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam. Menurutnya, proses mengosongkan pasar tersebut merupakan keharusan agar pengerjaan dapat berjalan lancar.

"Desain ada, tinggal kita bangun. Mereka yang dagang

kita pindahkan ke sekitar itu (pasar induk) untuk memenuhi kebutuhan mereka," ucap Rudi.

Wali Kota juga mengatakan kelak pasar yang terbangun dapat menampung semua pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sekitar Nagoya-Jodoh. Dikonfirmasi, Minggu (29/4)

Kepala Disperindag Batam Zarefriadi mengaku sebelum pemindahan terjadi, pedagang-pedagang di pasar induk yang ada saat ini sudah diberi surat peringatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Batam. "Lokasi pindahnya sebenarnya sudah ada lokasi, tapi masih perlu pembicaraan lagi," ucap Zaref. Rencananya lokasi pemindahan sementara tak jauh dari Pasar Induk, yakni lahan ko-

song di sekitar area Pasar Induk.

Lahan kosong itu akan dipinjam pakai sementara pada pemilik lahan sambil menunggu pembangunan Pasar Induk Jodoh selesai. ***

BAJA Batam Santuni Anak Yatim

Sambut Ramadan

RSUD Embung Fatimah Mulai Cicil Utang

BATAMKOTA (BP) - Utang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji yang mencapai Rp 19 miliar ke sejumlah vendor, mulai dicicil.

Direktur RSUD Embung Fatimah Batam Ani Dewiyana mengatakan pengelolaan keuangan di RSUD sudah mulai diselesaikan. Bahkan pengadaan obat sendiri sudah berjalan lancar dan tidak ada kendala lagi. Begitu juga utang RSUD per 2016 lalu yang mencapai Rp 19 miliar sudah mulai dibayarkan ke sejumlah vendor obat.

"Secara bertahap kita selesaikan. Kami juga sudah berkomunikasi dengan sejumlah vendor obat untuk penyelesaian," sebut Ani.

Sejauh ini, lanjutnya, sudah ada kesepakatan dengan vendornya. Semua pengadaan obat menggunakan e-katalog ataupun lelang. "Makanya tidak ada lagi obat kosong.

Sedangkan terkait utang, kita juga sudah mulai bayar ke sejumlah vendor obat," paparnya.

Sementara itu, terkait rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam untuk membentuk panitia khusus (pansus) pengelolaan keuangan RSUD, Ani enggan berkomentar banyak. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam. "Wah, itu bukan saya yang harus jawab," kata Ani singkat, kemarin.

Sebelumnya, Pansus Laporan Pertanggungjawaban APBD 2017 menggelar pembahasan bersama Direktur RSUD Embung Fatimah Batam Ani Dewiyana. Pada pembahasan itu, anggota DPRD Batam Jefry Simanjuntak menyoroti kegiatan RSUD yang mencapai Rp 98,8 miliar.

"Di situ ada kegiatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Peningkatan pelayanan



F. DALLI HARAHAP/EP

Ani Dewiyana

BLUD RSUD yang anggarannya Rp 80 miliar, hanya terealisasi Rp 65,6 miliar saja," ujar Jefry. Dari jumlah tersebut, lanjutnya, capaian kegiatan peningkatan BLUD diklaim manajemen RSUD sebesar 82 persen.

Padahal, kata Jefry lagi, di 2017 itu masa buruknya pengelolaan RSUD Embung Fatimah terkait tak adanya stok obat, banyaknya menolak

pasien karena beberapa alasan, ICU yang tak memadai, utang yang belum terselesaikan hingga jumlahnya miliaran rupiah.

Untuk itu, Jefry mempertanyakan kok bisa dalam hal peningkatan BLUD diklaim pencapaiannya mencapai 82 persen. Menurut dia, itu kan tak masuk akal. Maka, dengan bobroknya pengelolaan keuangan dan lainnya di RSUD Embung Fatimah ia mengusulkan dibentuknya Pansus RSUD.

"Pansus RSUD nanti agar kami bisa mengetahui secara detail ada apa sebenarnya dengan RSUD Embung Fatimah, di mana letak kesalahan pengelolaan RSUD selama ini. Pembentukan Pansus RSUD ini tujuannya untuk memperbaiki kinerja RSUD Batam terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Ini DPRD harus tahu apa yang salah dengan RSUD," ungkap Jefry. (rng)